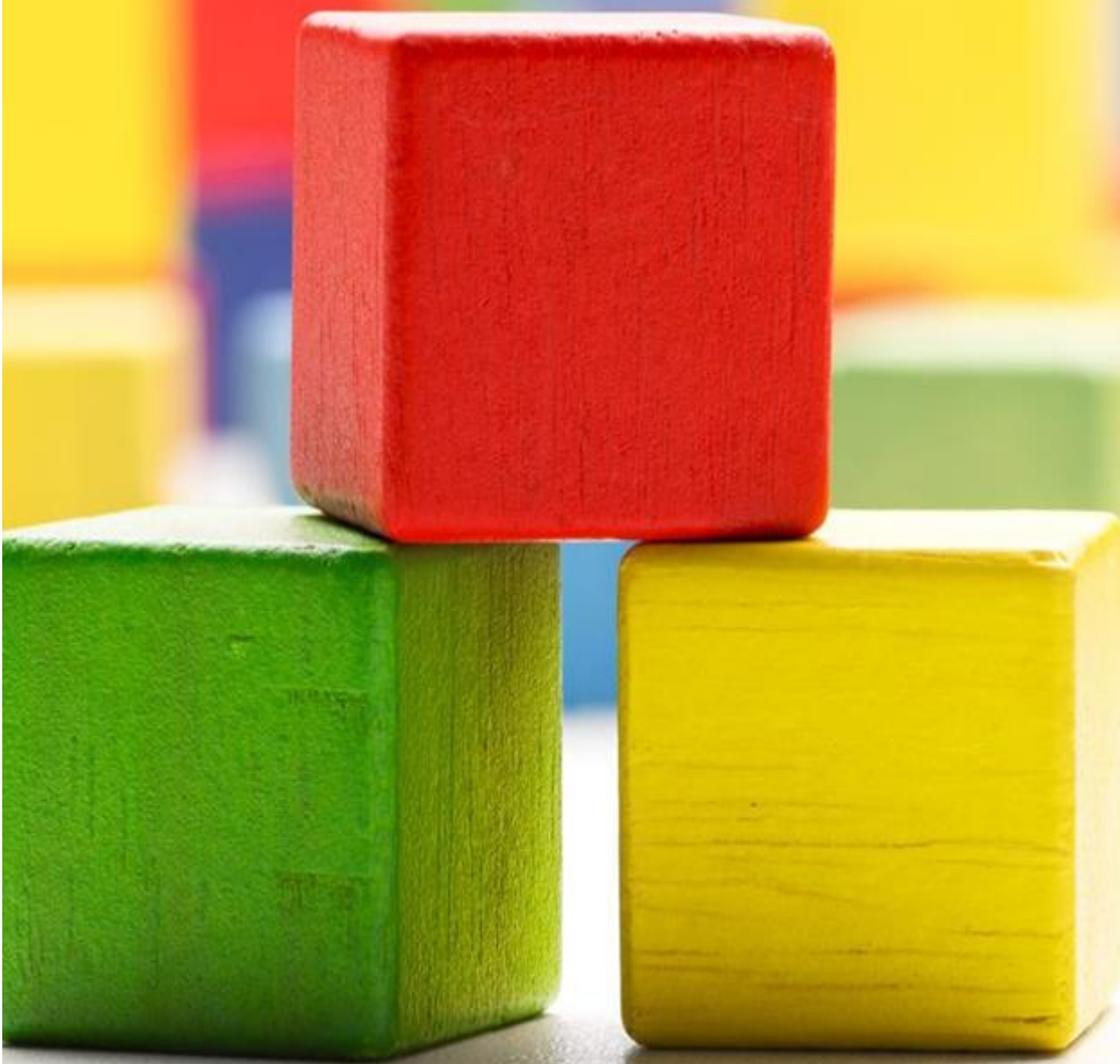




# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL TAHUN 2022**



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Jl. Cut Nyak Dhien No. 01 Telp. (0541) 661049, Fax. (0541) 661033  
TENGGARONG**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan : Cut Nyak Dhien No. 01 Telepon : 661049 – 661616 Kode Pos : 75512  
**TENGGARONG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : 00.87/SK/Set.2/DS/07/2021

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS SOSIAL**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
- PERTAMA : Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, merupakan acuan dan rencana kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ingin dicapai pada tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 19 Juli 2021

---



Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kutai Kartanegara,

**Ir. Didi Ramyadi, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640710 199301 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen **Rencana Kerja PD Dinas Sosial tahun 2022** dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja PD pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu lima tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Dinas Sosial sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Rencana Kerja PD oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan kurun waktu lima tahun, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurang sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen RENCANA KERJA PD ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, 19 Juli 2021



Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kutai Kartanegara,

**Ir. Didi Ramyadi, MM**  
Rembina Utama Muda  
NIP. 19640710 199301 1 001

## Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	31
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	58
<b>BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
4.1 Program dan Kegiatan	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial, warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada PMKS secara komprehensif dengan mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi, maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis.

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting untuk mencapai masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan penanganan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk tahun 2022 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 dan selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Rencana Kerja OPD merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan

penyusunan Rencana Kerja OPD untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam beberapa aturan perundangan dibawahnya. Landasan hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ;
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
20. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ;
21. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) ;
22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ;

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ;
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Permendagri no. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD setra tata cara perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 adalah :

1. Mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam Rencana Strategis sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kebijakan dan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Menyediakan dokumen perencanaan yang lebih operasional baik dalam pelaksanaan maupun evaluasi pencapaian target yang ditentukan.
4. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan sinergis dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Naskah Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA\_PD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja\_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra\_PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja\_PD

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Program dan Kegiatan

**BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja\_Dinas Sosial tahun lalu dan capaian Renstra PD**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2020 melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

##### **1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tertentu sangatlah diperlukan. Besar kecilnya anggaran yang diperlukan tergantung pada seberapa besar fungsi yang dilaksanakan oleh suatu SKPD. Jika anggaran tersedia secara memadai maka target yang ingin dicapai untuk mewujudkan indikator tertentu akan cenderung tercapai. Sebaliknya jika anggaran tidak tersedia secara memadai maka akan sulit untuk mencapai target yang diharapkan.

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap menurunnya realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama pada tahun 2019 adalah faktor sumber daya manusia. Dinas Sosial merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten. Tugas utama tersebut dilaksanakan dalam bentuk perubahan perilaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari yang semula disfungsi sosial kemudian menjadi perilaku yang dapat berfungsi sosial secara optimal. Setelah para PMKS dapat berfungsi sosial secara optimal maka diberikan bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan untuk mempertahankan keberfungsian sosialnya.

**2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

Program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk bidang sosial terdapat 5 program yang meliputi : Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS; Program Penanganan Fakir Miskin; Program Pemberdayaan Sosial; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Program Pelayanan Panti Asuhan dan panti Jompo. Dari 5 program tersebut Pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS**

**1) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Psikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre**

Kegiatan ini dimaksud untuk memberikan pelayanan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak kekerasan, perlakuan salah dan berkonflik dengan hukum. Sasaran kegiatan ini adalah anak dan perempuan. Khusus anak fokusnya tidak hanya pada korban tetapi juga pada pelaku. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa anak belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, sehingga jika dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan maka sebenarnya dia merupakan korban dari sistem sosial yang tidak berjalan dengan semestinya. Dengan memperhatikan kecendrungan kasus mulai tahun 2015 hingga tahun 2018 maka diperkirakan tahun 2019 akan ada 45 kasus yang ditangani. Namun sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah kasus yang ditangani sejumlah 52 kasus.

**2) Kegiatan Pelayanan Sosial Harian (Day care service) bagi Tuna sosial di UPT Loka Bina Karya.**

Kegiatan ini ditujukan kepada para penyandang Psikotik (ODGJ) terlantar yang belum ditemukan keberadaan keluarganya. Dinas Sosial hadir sebagai keluarga pengasuh bagi mereka dengan memberikan kebutuhan dasar selama masa transisi akibat kebijakan dihapusnya Jaminan Kesehatan Nasional dan Jamkesda. Dalam pelaksanaannya BPJS bagi ODGJ terlantar ini hanya dapat diterima selama 28 hari di Rumah sakit jiwa setelah itu harus dikembalikan dulu kepada keluarganya dan bias masuk ke RSJ lagi setelah 7-14 hari. Selama masa transisi tersebut Dinas Sosial memberikan jaminan

Hidup berupa tempat tinggal, makan minum dan pengawasan sehari-hari hingga ditemukannya Keluarga dari Pasien atau dirujuk ke Panti Bina Laras jika sudah dianggap tenang dan mampu mengendalikan diri.

3) Kegiatan Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar

korban bencana untuk meringankan penderitaan mereka akibat bencana yang dialami dan diberikan selama masa tanggap darurat. Prosesnya adalah pada saat bencana terjadi para korban ini dievakuasi ketempat-tempat yang aman kemudian barulah diberikan bantuan untuk pemenuhan dasar. Penanganan korban bencana dikabupaten kutai kartanegara tidak dilakukan sendiri oleh Dinas Sosial melainkan dilakukan secara terkoordinasi dibawah kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah korban bencana yang berhasil diberikan bantuan selama masa tanggap darurat sejumlah 20.149 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan.

4) Kegiatan Pengadaan Alat Bantu Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Kegiatan ini merupakan bentuk pemberdayaan kepada Penyandang Disabilitas yang dilakukan melalui pemberian alat bantu aksesibilitas. Target yang ditetapkan untuk kegiatan ini adalah 50 orang lanjut usia potensial, hingga saat ini masih dalam tahapan verifikasi berkas usulan dan proposal permohonan dari calon penerima program.

b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Kegiatan Penunjang Operasional Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)

Kegiatan ini merupakan sharing dana Pemerintah Kabupaten terhadap program pemerintah pusat yang berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pemerintah pusat dimaksudkan sebagai upaya percepatan dalam memutus mata rantai kemiskinan. Pemerintah pusat menyediakan anggaran untuk santunan bagi rumah tangga penerima manfaat program, honorarium dan operasional petugas pendamping. Melalui kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan kontribusi untuk menunjang operasional kegiatan di sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), perluasan jangkauan

sosialisasi pelaksanaan program, dan bantuan biaya lain yang diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku. Bantuan biaya ini diberikan untuk kebutuhan selama 12 bulan untuk tahun 2019 dengan jumlah SDM PKH sebanyak 104 orang yang tersebar di 18 Kecamatan. Pendanaan Kegiatan ini yang bersumber dari APBD merupakan amanah Menteri Sosial RI dimana setiap Kabupaten Kota yang memperoleh bantuan PKH wajib menyediakan dana Sharing sebesar 5% dari total seluruh bantuan PKH yang di terima Kabupaten tersebut. Dinas Sosial mencatat bahwa bantuan yang di terima masyarakat miskin di Kukar melalui program PKH senilai 50 Miliar sehingga minimal dana yang harus disediakan dalam upaya mendukung pendampingan program tersebut minimal 2,5 Miliar per tahunnya, sehingga proses pendampingan dapat berjalan sesuai dengan standar pola pendampingan menurut Kementerian Sosial RI.

2. Kegiatan Penanganan Masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat daarurat dan kejadian luar biasa

Kegiatan ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan hidup korban bencana alam maupun social selama masa tanggap darurat. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat yang dibutuhkan para korban selama 2 s/d 7 hari. Dalam pelaksanaanya di tahun 2019 stok bantuan yang tersedia di gudang bantuan Dinas Sosial dalam keadaan menipis akibat seringnya terjadi musibah bencana di wilayah kutai kartanegara selam 6 bulan terakhir sehingga sangat diperlukan tambahan pemenuhan kebutuhan stok bantuan bagi korban bencana baik alam maupun sosial.

3. Program Pemberdayaan Sosial

1) Kegiatan Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai.

Kegiatan ini merupakan proses pendampingan dan verifikasi penerima santunan veteran dan janda veteran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini tercatat ada sebanyak 128 Veteran dan janda veteran yang memperoleh santunan bulanan. hingga akhir bulan juni seluruh veteran dan janda veteran telah terverifikasi factual dan saat ini dalam proses penyaluran santunanya melalui BPKAD.

- 2) Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)  
Sasaran kegiatan ini adalah lembaga kesejahteraan sosial atau sarana sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Pekerjaan yang dilakukan berupa pembinaan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial melalui sistem panti. Sasarannya adalah 18 lembaga kesejahteraan sosial yang telah terdaftar dan target hingga akhir tahun ini adalah sosialisasi terhadap seluruh LKSA yang ada di wilayah Kabupaten Kukar agar segera memenuhi persyaratan resmi yang telah ditetapkan dan kedepannya dinas sosial memberikan bimbingan terkait pemenuhan akreditasi LKSA tersebut.

#### 4. Program Penanganan Fakir Miskin

- 1) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (Rastra)  
Kegiatan ini merupakan program pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dalam rangka untuk membantu masyarakat miskin dimaksudkan sebagai upaya percepatan dalam memutus mata rantai kemiskinan yang ada di kabupaten kutai kartanegara. pemerintah daerah menyediakan honorarium dan biaya operasional petugas pendamping dalam penyaluran beras sejahtera. Melalui kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan kontribusi untuk menunjang operasional kegiatan dan bantuan biaya lain yang diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku. Bantuan biaya ini diberikan untuk kebutuhan selama 12 bulan untuk tahun 2019.
- 2) Peningkatan Kapasitas Petugas Kesejahteraan Sosial  
Kegiatan ini bertujuan memberikan ketrampilan dan pemahaman dalam pengelolaan Data Kemiskinan bagi Puskesmas Desa maupun Kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Kukar. Puskesmas diharapkan akan menjadi perpanjangan tangan Dinas Sosial di Desa dan Kelurahan dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan sosial yang mungkin muncul ditengah masyarakat. Puskesmas juga akan dibekali kemampuan mengaplikasikan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang menjadi alat pendataan bagi warga miskin yang berhak menerima bantuan dari pemerintah.

### **3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

Secara umum realisasi Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2019 berkisar diangka 30 % dan tidak terdapat program ataupun kegiatan yang melampaui target yang ditetapkan akibat ketersediaan anggaran kegiatan yang tidak sesuai rencana. Kekhawatiran terjadinya kegiatan terhutang seperti di tahun 2020 menjadikan para pelaksana kegiatan sangat berhati hati dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan. Harapannya kepastian ketersediaan anggaran segera disampaikan oleh instansi terkait, agar program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun penganggaran.

### **4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;**

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap menurunnya realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama pada tahun 2019 adalah faktor sumber daya manusia. Dinas Sosial merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten. Tugas utama tersebut dilaksanakan dalam bentuk perubahan perilaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari yang semula disfungsi sosial kemudian menjadi perilaku yang dapat berfungsi sosial secara optimal. Setelah para PMKS dapat berfungsi sosial secara optimal maka diberikan bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan untuk mempertahankan keberfungsian sosialnya. Hal ini menyebabkan proses perubahan perilaku tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, dan pemberian bantuan modal UEP tetap dilaksanakan sehingga masyarakat lebih mengenal Dinas Sosial sebagai instansi yang memberikan bantuan sosial. Jika potensi ini dikelola dengan baik dan diarahkan untuk program-program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan bantuan sosial, maka kemungkinan untuk menekan angka kemiskinan sampai pada titik paling rendah akan dapat terwujud.

## **5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra\_PD;**

Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial saat ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## **6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

Strategi dan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial disusun sebagai acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam langkah kerja operasional berupa program-program pelayanan maupun program penunjang pelayanan kepada kelompok sasaran. Dalam menentukan program pelayanan setidaknya ada 2 (dua) instrumen yang harus dipedomani yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta aturan perubahannya dan program prioritas nasional di bidang sosial yang harus dilaksanakan oleh daerah.

Setiap program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai indikator program. Indikator kinerja program merupakan indikator kinerja manfaat (*outcome*) sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan indikator kinerja keluaran (*output*). Indikator *outcome* bisa diperoleh jika indikator *output* dari masing-masing kegiatan dapat berfungsi. Sedangkan indikator *output* merupakan indikator yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Diantara indikator *output*, *outcome* dan indikator kinerja sasaran memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja\_PD Tahun 2020 hingga semester pertama secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2020 dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		CAPAIAN PER TRIWULAN								TOTAL			STATUS PELAKSANAAN (%)
				I		II		III		IV					
				K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	
<b>0000.01</b>															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
010101060101003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional															
20192001031017458 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Rp27,000,000		Rp176,000		Rp610,800		Rp0		Rp0		Rp786,800		2.91%	
1	20192001031017466 Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional yang dibayar/ diperpanjang	50	Unit	13	Unit	30	Unit	0	Unit	0	Unit	43	Unit	86.00%	30.00%
010101060101006 Penyediaan alat tulis kantor															
20192001031017471 Penyediaan alat tulis kantor		Rp85,095,000		Rp84,857,300		Rp0		Rp0		Rp0		Rp84,857,300		99.72%	
2	20192001031017476 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	70	Jenis	102	Jenis	102	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	204	Jenis	291.43%	100.00%
010101060101007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan															
20192001031017479 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Rp29,250,000		Rp13,550,000		Rp2,829,500		Rp0		Rp0		Rp16,379,500		56.00%	
3	20192001031017490 Jumlah barang cetakan	10	Jenis	6	Jenis	15	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	21	Jenis	210.00%	100.00%
010101060101008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor															
20192001031017493 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Rp12,937,200		Rp12,936,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp12,936,000		99.99%	

4	20192001031017498 Jumlah Komponen Instalasi Listrik	20	Jenis	6	Jenis	3	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	9	Jenis	45.00%	100.00%
010101060101009 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan															
20192001031017501 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Rp8,316,000		Rp1,065,000		Rp1,197,000		Rp0		Rp0		Rp2,262,000		27.20%	
5	20192001031017507 Jumlah Bahan Bacaan	1,600	Eksemplar	230	Eksemplar	1,188	Eksemplar	0	Eksemplar	0	Eksemplar	1,418	Eksemplar	88.63%	35.00%
010101060101010 Penyediaan bahan logistik kantor															
20192001031017510 Penyediaan bahan logistik kantor		Rp15,000,000		Rp0		Rp13,620,000		Rp0		Rp0		Rp13,620,000		90.80%	
6	20192001031017517 Jumlah bahan logistik kantor	20	Jenis	6	Jenis	6	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	12	Jenis	60.00%	100.00%
010101060101011 Penyediaan makanan dan minuman															
20192001031017520 Penyediaan makanan dan minuman		Rp38,100,000		Rp7,850,000		Rp0		Rp8,150,000		Rp0		Rp16,000,000		41.99%	
7	20192001031017528 Jumlah makanan dan minuman	600	Porsi	6	Porsi	15	Porsi	0	Porsi	0	Porsi	21	Porsi	3.50%	35.00%
010101060101012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah															
20192001031017531 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah		Rp185,000,000		Rp25,075,000		Rp28,880,000		Rp16,819,748		Rp0		Rp70,774,748		38.26%	
8	20192001031017538 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	350	OH	68	OH	106	OH	0	OH	0	OH	174	OH	49.71%	35.00%
010101060101013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran															
20192001031017541 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran		Rp638,948,373		Rp46,349,600		Rp132,625,520		Rp40,705,476		Rp0		Rp219,680,596		34.38%	
9	20192001031017558 Jumlah tenaga THL/ non PNS yang dibayar	12	Bulan	6	Bulan	15	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	21	Bulan	175.00%	35.00%

01060101001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik															
20192001031017439 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Rp240,750,000		Rp33,310,641		Rp54,051,617		Rp13,464,249		Rp0		Rp100,826,507		41.88%	
10	20192001031017455 Jumlah Rekening Listrik, Air Telepon dan Internet	12	Bulan	6	Bulan	15	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	21	Bulan	175.00%	50.00%
01060101014 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja															
20192001031017559 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Rp65,000,000		Rp6,670,000		Rp13,075,000		Rp0		Rp0		Rp19,745,000		30.38%	
11	20192001031017564 Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	40	Jenis	12	Jenis	12	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	24	Jenis	60.00%	30.00%
01060101015 Penyediaan Jasa surat Menyurat															
20192001031017567 Penyediaan Jasa surat Menyurat		Rp4,200,000		Rp825,000		Rp825,000		Rp0		Rp0		Rp1,650,000		39.29%	
12	20192001031017573 Jumlah Surat	700	Buah	300	Buah	750	Buah	0	Buah	0	Buah	1,050	Buah	150.00%	35.00%
01060101016 Penataan Arsip Perangkat Daerah															
20192001031017576 Penataan Arsip Perangkat Daerah		Rp250,000,000		Rp0		Rp157,194,000		Rp17,100,000		Rp0		Rp174,294,000		69.72%	
13	20192001031017628 Jumlah Arsip yang tertata	1,000	Arsip	6	Arsip	15	Arsip	0	Arsip	0	Arsip	21	Arsip	2.10%	35.00%
<b>RATA-RATA</b>													<b>107.41%</b>	<b>55.38%</b>	
<b>PREDIKAT</b>													<b>SANGAT TINGGI</b>	<b>RENDAH</b>	
<b>0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>															
01060102002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor															
20192001031017769 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Rp26,342,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
14	20192001031017785 Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5	Unit	3	Unit	3	Unit	0	Unit	0	Unit	6	Unit	120.00%	15.00%

01060102003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional															
20192001031017788 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Rp238,500,660		Rp0		Rp28,614,800		Rp9,261,999		Rp0		Rp37,876,799		15.88%	
15	20192001031017819 Jumlah kendaraan dinas operasional	60	Unit	6	Unit	15	Unit	0	Unit	0	Unit	21	Unit	35.00%	26.00%
01060102005 Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor															
20192001031017822 Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Rp44,790,000		Rp0		Rp21,523,400		Rp5,835,000		Rp0		Rp27,358,400		61.08%	
16	20192001031017842 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	10	Jenis	6	Jenis	15	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	21	Jenis	210.00%	100.00%
01060102007 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor															
20192001031017632 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor		Rp50,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
17	20192001031017653 Jumlah gedung kantor yang direhab	5	Unit	3	Unit	3	Unit	0	Unit	0	Unit	6	Unit	120.00%	11.00%
01060102009 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
20192001031017656 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Rp76,120,000		Rp0		Rp1,769,400		Rp18,000,000		Rp0		Rp19,769,400		25.97%	
18	20192001031017680 Jumlah perlengkapan gedung kantor	10	Unit	3	Unit	5	Unit	0	Unit	0	Unit	8	Unit	80.00%	25.00%
01060102010 Rehab Berat Taman Makam Pahlawan															
20192001031017683 Rehab Berat Taman Makam Pahlawan		Rp133,000,000		Rp10,617,000		Rp90,174,550		Rp0		Rp0		Rp100,791,550		75.78%	
19	20192001031017710 Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhab	2	Bangunan	3	Bangunan	3	Bangunan	0	Bangunan	0	Bangunan	6	Bangunan	300.00%	80.00%
01060102011 Peringatan Hari-hari Besar Nasional lingkup tugas Dinas Sosial															

20192001031017713 Peringatan Hari-hari Besar Nasional lingkup tugas Dinas Sosial		Rp70,000,000		Rp64,404,400		Rp2,797,800		Rp0		Rp0		Rp67,202,200		96.00%	
20	20192001031017747 Jumlah peringatan hari hari besar nasional	1	Kegiatan	6	Kegiatan	15	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	21	Kegiatan	2100.00%	80.00%
01060102012 Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan															
20192001031017750 Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan		Rp25,000,000		Rp0		Rp8,189,400		Rp0		Rp0		Rp8,189,400		32.76%	
21	20192001031017766 Jumlah Museum Perjuangan dan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	10	Bulan	6	Bulan	9	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	15	Bulan	150.00%	30.00%
													<b>RATA-RATA</b>	<b>389.38%</b>	<b>45.88%</b>
													<b>PREDIKAT</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
<b>0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>															
01060105003 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah															
20192001031017845 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah		Rp100,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
22	20192001031017869 Jumlah Anggota Tim Bekias OPD yang terfasilitasi	11	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0.00%	8.00%
01060105024 Penyusunan Dokumen Kepegawaian															
20192001031017872 Penyusunan Dokumen Kepegawaian		Rp78,299,560		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
23	20192001031017900 Jumlah Dokumen Kepegawaian	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00%	1.00%
													<b>RATA-RATA</b>	<b>0.00%</b>	<b>4.50%</b>
													<b>PREDIKAT</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>

<b>0000.06</b>															
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>															
01060106001 Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan															
20192001031017901 Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan		Rp200,000,000		Rp14,143,883		Rp41,113,498		Rp14,770,000		Rp0		Rp70,027,381		35.01%	
24	20192001031017923 Jumlah dokumen laporan capaian	8	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	5	Dokumen	62.50%	60.00%
01060106036 Inventarisasi Barang Milik Daerah															
20192001031017926 Inventarisasi Barang Milik Daerah		Rp50,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
25	20192001031017943 Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	1	Dokumen	6	Dokumen	15	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	21	Dokumen	2100.00%	25.00%
01060106113 Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah															
20192001031017944 Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah		Rp190,732,000		Rp58,503,000		Rp39,002,000		Rp19,501,000		Rp0		Rp117,006,000		61.35%	
26	20192001031017960 Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Keuangan	1	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	6	Dokumen	600.00%	50.00%
01060106114 Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah															
20192001031017962 Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah		Rp57,046,000		Rp0		Rp18,948,000		Rp5,766,000		Rp0		Rp24,714,000		43.32%	
27	20192001031017977 Jumlah laporan Rekonsiliasi BMD	2	Satuan	6	Satuan	15	Satuan	0	Satuan	0	Satuan	21	Satuan	1050.00%	30.00%
													<b>RATA-RATA</b>	<b>953.13%</b>	<b>41.25%</b>
													<b>PREDIKAT</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
<b>0106.19</b>															
<b>Program Pembinaan Panti Asuhan Anak /Panti Jompo</b>															
01060119001 Fasilitasi Pelayanan anak pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong															

20192001031017980 Fasilitasi Pelayanan anak pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong		Rp1,015,000,000		Rp0		Rp132,317,350		Rp23,835,000		Rp0		Rp156,152,350		15.38%	
28	20192001031018040 Jumlah anak asuh yang terfasilitasi	40	Anak	80	Anak	0	Anak	0	Anak	0	Anak	80	Anak	200.00%	35.00%
20192001031018043 Pengadaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan di Kec. Tenggarong		Rp150,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
29	20192001031018074 Jumlah anak asuh yang terfasilitasi	40	Anak	0	Anak	0	Anak	0	Anak	0	Anak	0	Anak	0.00%	26.00%
<b>RATA-RATA</b>													<b>100.00%</b>	<b>30.50%</b>	
<b>PREDIKAT</b>													<b>SANGAT TINGGI</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>	
<b>0106.27</b>															
<b>Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS</b>															
01060127001 Pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre ( RPTC ) dan Penguatan Fungsi Sosial															
20192001031018076 Pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre ( RPTC ) dan Penguatan Fungsi Sosial		Rp350,000,000		Rp15,292,936		Rp41,238,200		Rp18,582,500		Rp0		Rp75,113,636		21.46%	
30	20192001031018094 Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan dan perlakuan salah yang menerima rehabilitasi psikososial	50	orang	34	orang	44	orang	0	orang	0	orang	78	orang	156.00%	32.00%
01060127002 Fasilitasi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia Non Potensial															
20192001031018097 Fasilitasi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia Non Potensial		Rp150,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
31	20192001031018117 Jumlah alat bantu aksesibilitas bagi lansia non potensial	50	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0.00%	0.00%
01060127004 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia (adopsi, anak terlantar masuk panti, PSBR, Panti lansia)															
20192001031018120 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia (adopsi, anak terlantar masuk panti, PSBR, Panti lansia)		Rp100,000,000		Rp0		Rp12,930,400		Rp0		Rp0		Rp12,930,400		12.93%	
32	20192001031018136 Jumlah Anak dan Lanjut Usia	50	orang	4	orang	4	orang	0	orang	0	orang	8	orang	16.00%	29.00%

01060127005 Fasilitasi alat bantu aksesibilitas, bagi penyandang Disabilitas (dan Eks penyakit kronis -kusta,tb paru,)															
20192001071106210 Fasilitasi alat bantu aksesibilitas, bagi penyandang Disabilitas (dan Eks penyakit kronis -kusta,tb paru,)		Rp150,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
33	20192001071106239 jumlah penyandang disabilitas penerima alat bantu	50	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0.00%	0.00%
01060127006 Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti (SDLB)															
20192001031018171 Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti (SDLB)		Rp200,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
34	20192001031018203 jumlah anak dengan kecacatan penerima pelayanan	40	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0.00%	0.00%
01060127007 Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang disabilitas dan eks trauma (psikotik dan pasung, kusta)															
20192001031018206 Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang disabilitas dan eks trauma (psikotik dan pasung, kusta)		Rp100,000,000		Rp0		Rp12,000,000		Rp4,750,000		Rp0		Rp16,750,000		16.75%	
35	20192001031018223 jumlah penyandang cacat dan eks trauma penerima rehabilitasi sosial dan medis	25	orang	20	orang	38	orang	0	orang	0	orang	58	orang	232.00%	60.00%
01060127008 Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)- fungsi bantuan rehab oleh masyarakat langsung															
20192001031018226 Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)- fungsi bantuan rehab oleh masyarakat langsung		Rp100,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
36	20192001031018260 Jumlah pelaksana Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) (orang)	25	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0.00%	0.00%
01060127009 Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya															
20192001031018263 Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya		Rp100,000,000		Rp0		Rp0		Rp10,305,000		Rp0		Rp10,305,000		10.31%	

37	20192001031018308 Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya	10	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0.00%	0.00%
01060127010 Pelayanan Sosial Harian (day care services) bagi tuna sosial di UPT Loka Bina Karya (LBK) Tenggara															
20192001031018311 Pelayanan Sosial Harian (day care services) bagi tuna sosial di UPT Loka Bina Karya (LBK) Tenggara		Rp220,000,000		Rp0		Rp41,679,200		Rp0		Rp0		Rp41,679,200		18.95%	
38	20192001031018341 jumlah orang yang memperoleh pelayanan sosial dalam shelter (OH)	80	orang	34	orang	40	orang	0	orang	0	orang	74	orang	92.50%	19.00%
01060127011 Fasilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial															
20192001031018344 Fasilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial		Rp250,000,000		Rp0		Rp43,020,000		Rp2,180,000		Rp0		Rp45,200,000		18.08%	
39	20192001031018364 Jumlah pemulangan OT, eks napi, napza, trafficking, gepeng, PSK, ODHA dan masalah sosial ke daerah asalnya	125	orang	76	orang	236	orang	0	orang	0	orang	312	orang	249.60%	27.00%
01060127012 Fasilitasi Rehabilitasi penderita ODHA (Orang dengan HIV AIDS) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif)															
20192001031018367 Fasilitasi Rehabilitasi penderita ODHA (Orang dengan HIV AIDS) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif)		Rp100,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
40	20192001031018407 Jumlah penderita ODHA dan NAPZA	25	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0.00%	1.00%
20192001031018410 Bantuan Usaha Ekonomi Kreatif Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA		Rp125,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
41	20192001031018428 Jumlah penderita ODHA dan NAPZA	15	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0.00%	1.00%
01060127013 Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila (WTS)															
20192001031018430 Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila (WTS)		Rp100,000,000		Rp0		Rp11,390,000		Rp0		Rp0		Rp11,390,000		11.39%	

42	20192001031018444 Jumlah Tuna Susila yang direhabilitasi (Orang)	50	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0.00%	10.00%
01060127014 Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Sosial															
20192001031018447 Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Sosial		Rp100,000,000		Rp0		Rp11,097,800		Rp0		Rp0		Rp11,097,800		11.10%	
43	20192001031018470 Jumlah Anggota Tim yang terfasilitasi	20	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0.00%	13.00%
20192001031018473 Fasilitasi Edukasi Pencegahan dan Penanganan Korban Penyalahgunaan NAPZA (Esensi Muda Kaltim) di Kab. Kutai Kartanegara.		Rp175,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
44	20192001031018512 Jumlah Anggota Tim yang terfasilitasi	15	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0.00%	1.00%
01060127015 Fasilitasi Penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial															
20192001031018514 Fasilitasi Penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial		Rp100,000,000		Rp0		Rp29,760,400		Rp0		Rp0		Rp29,760,400		29.76%	
45	20192001031018530 Jumlah penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	100	orang	0	orang	50	orang	0	orang	0	orang	50	orang	50.00%	30.00%
													<b>RATA-RATA</b>	<b>49.76%</b>	<b>13.94%</b>
													<b>PREDIKAT</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
<b>0106.28 Program Penanganan Fakir Miskin</b>															
01060128001 Fasilitasi Ketrampilan Berusaha bagi Fakir Miskin															
20192001031018666 Fasilitasi Ketrampilan Berusaha bagi Fakir Miskin		Rp125,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
46	20192001031018711 Jumlah Fakir Miskin yang memperoleh Pelatihan Ketrampilan	50	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0.00%	5.00%

01060128002 Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (Rastra)															
20192001031018714 Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (Rastra)		Rp600,000,000		Rp27,999,094		Rp61,392,055		Rp31,287,293		Rp0		Rp120,678,442		20.11%	
47	20192001031018752 Jumlah Fakir miskin yang penerima BPNT (KK) JUMLAH PENERIMA	24,000	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0.00%	15.00%
01060128003 Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu															
20192001031018755 Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu		Rp153,349,600		Rp0		Rp25,875,000		Rp0		Rp0		Rp25,875,000		16.87%	
48	20192001031018775 Jumlah dokumen Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	2	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	5	Dokumen	250.00%	26.00%
20192001031018899 Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota (DAK)		Rp98,626,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
49	20192001031018920 Jumlah dokumen Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	2	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	100.00%	10.00%
01060128004 Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Operasional puskesmas kel)															
20192001031018778 Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Operasional puskesmas kel)		Rp336,604,650		Rp0		Rp6,492,300		Rp0		Rp0		Rp6,492,300		1.93%	
50	20192001031018812 Jumlah Petugas Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	275	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0.00%	11.00%
01060128005 Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas (musrenbang)															
20192001031018815 Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas (musrenbang)		Rp50,000,000		Rp42,540,000		Rp4,044,700		Rp0		Rp0		Rp46,584,700		93.17%	
51	20192001031018827 Jumlah dokumen Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas	1	dokumen	1	dokumen	3	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	4	dokumen	400.00%	100.00%

01060128006 Fasilitasi kerjasama pendampingan sosial															
20192001031018830 Fasilitasi kerjasama pendampingan sosial		Rp100,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
52	20192001031018866 jumlah Kesepakatan dengan pihak ketiga	25	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00%	26.00%
01060128007 Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab Kutai Kartanegara)															
20192001031018869 Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab Kutai Kartanegara)		Rp85,045,750		Rp0		Rp21,702,649		Rp11,100,000		Rp0		Rp32,802,649		38.57%	
53	20192001031018890 Operasional sekretariat layanan rujukan terpadu yang ditindak lanjuti (bulan)	12	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	6	Bulan	50.00%	40.00%
01060128008 Operasional Puskessos Kelurahan															
20192001031018922 Rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) (DAK)		Rp558,250,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
54	20192001031018937 Jumlah Puskessos di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional	50	kelurahan	0	kelurahan	0	kelurahan	0	kelurahan	0	kelurahan	0	kelurahan	0.00%	20.00%
01060128010 Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Keluarga Muda Mandiri															
20192001031018533 Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Keluarga Muda Mandiri		Rp125,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
55	20192001031018577 Jumlah KK yang memperoleh pelatihan ketrampilan	50	Orang	0	Orang	0	Orang	50	Orang	0	Orang	50	Orang	100.00%	1.00%
01060128011 Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi															
20192001031018580 Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi		Rp125,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
56	20192001031018625 Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan	50	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0.00%	0.00%

01060128012 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesejahteraan Sosial															
20192001031018628 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesejahteraan Sosial		Rp390,000,000		Rp0		Rp11,030,000		Rp20,759,700		Rp0		Rp31,789,700		8.15%	
57	20192001031018663 jumlah petugas puskesmas yang memperoleh bimbingan teknis	730	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0.00%	15.00%
<b>RATA-RATA</b>													<b>75.00%</b>	<b>22.42%</b>	
<b>PREDIKAT</b>													<b>SEDANG</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>	
<b>0106.29 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>															
01060129001 Penunjang Operasional Pendampingan Program Keluarga Harapan															
20192001031019253 Penunjang Operasional Pendampingan Program Keluarga Harapan		Rp850,000,000		Rp44,318,003		Rp69,332,800		Rp21,755,000		Rp0		Rp135,405,803		15.93%	
58	20192001031019292 Jumlah Pendampingan Program Keluarga Harapan	250	Pendampingan	35	Pendampingan	10	Pendampingan	0	Pendampingan	0	Pendampingan	45	Pendampingan	18.00%	26.00%
20192001031019293 Capacity Building SDM PKH Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp300,000,000		Rp29,632,246		Rp0		Rp6,700,000		Rp0		Rp36,332,246		12.11%	
59	20192001031019331 Jumlah Pendampingan Program Keluarga Harapan	250	Pendampingan	25	Pendampingan	10	Pendampingan	0	Pendampingan	0	Pendampingan	35	Pendampingan	14.00%	26.00%
01060129002 Fasilitasi Pertemuan peningkatan Kemampuan KPM PKH															
20192001031019332 Fasilitasi Pertemuan peningkatan Kemampuan KPM PKH		Rp150,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
60	20192001031019355 Jumlah KPM PKH yang mengikuti P2K2	30	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0.00%	25.00%
01060129003 Bantuan stimulan bagi KPM															
20192001031019358 Bantuan stimulan bagi KPM		Rp200,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	

61	20192001031019381 Jumlah KPM PKH yang memperoleh bantuan stimulan	100	keluarga	0	keluarga	0	keluarga	0	keluarga	0	keluarga	0	keluarga	0.00%	25.00%
01060129004 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa															
20192001031019384 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa		Rp600,000,000		Rp0		Rp249,043,500		Rp29,480,000		Rp0		Rp278,523,500		46.42%	
62	20192001031019417 Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	3,000	Jiwa	492	Jiwa	1,512	Jiwa	0	Jiwa	0	Jiwa	2,004	Jiwa	66.80%	40.00%
01060129005 Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)															
20192001031019420 Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)		Rp100,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
63	20192001031019450 Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas TAGANA	40	orang	120	orang	120	orang	0	orang	0	orang	240	orang	600.00%	10.00%
01060129006 Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)															
20192001031019453 Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)		Rp100,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
64	20192001031019485 Jumlah Pembentukan Kampung Siaga Bencana	1	Desa/Kelurahan	3	Desa/Kelurahan	3	Desa/Kelurahan	0	Desa/Kelurahan	0	Desa/Kelurahan	6	Desa/Kelurahan	600.00%	10.00%
													<b>RATA-RATA</b>	<b>185.54%</b>	<b>23.14%</b>
													<b>PREDIKAT</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
<b>0106.30 Program Pemberdayaan Sosial</b>															
01060130003 Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara															
20192001031019587 Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp125,000,000		Rp0		Rp20,000,000		Rp2,400,000		Rp0		Rp22,400,000		17.92%	

65	20192001031019609 Jumlah veteran dan janda veteran penerima santunan	125	Orang	18	Orang	54	Orang	0	Orang	0	Orang	72	Orang	57.60%	26.00%
01060130004 Penguatan Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial															
20192001031019612 Penguatan Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial		Rp100,000,000		Rp0		0.00%									
66	20192001031019651 Jumlah peserta seminar tentang nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	50	Orang	0	Orang	0.00%	1.00%								
01060130005 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)															
20192001031019654 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)		Rp200,000,000		Rp0		0.00%									
67	20192001031019690 Jumlah LKSA yang memperoleh bantuan dibagi jumlah LKSA yang terdaftar	25	Lembaga	0	Lembaga	13	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	13	Lembaga	52.00%	1.00%
01060130007 Fasilitasi Pembinaan PUB dan UGB															
20192001031019693 Fasilitasi Pembinaan PUB dan UGB		Rp50,532,000		Rp0		0.00%									
68	20192001031019738 jumlah Lembaga yang menerima pembinaan PUB dan UGB	25	Lembaga	0	Lembaga	0.00%	1.00%								
01060130008 Fasilitasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan															
20192001031019739 Fasilitasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan		Rp200,000,000		Rp0		0.00%									
69	20192001031019779 Jumlah PKSK Kelembagaan yang memperoleh Fasilitasi pengembangan	40	Lembaga	0	Lembaga	0.00%	1.00%								
20192001031019782 Pelantikan Karang Taruna Kabupaten dan Monitoring Karang Taruna Kecamatan		Rp125,000,000		Rp0		0.00%									
70	20192001031019829 Jumlah PKSK Kelembagaan yang memperoleh Fasilitasi pengembangan	0	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0.00%	1.00%

01060130009 Fasilitasi pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan															
20192001031019488 Fasilitasi pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan		Rp300,000,000		Rp0		0.00%									
71	20192001031019535 Jumlah PSKS perorangan yang memperoleh pembinaan	40	Orang	0	Orang	0.00%	1.00%								
20192001031019538 Capacity Building PSKS Perorangan Kab. Kutai Kartanegara		Rp300,000,000		Rp0		0.00%									
72	20192001031019584 Jumlah PSKS perorangan yang memperoleh pembinaan	104	Orang	0	Orang	0.00%	1.00%								
01060130010 Operasional Puskessos Kelurahan															
20192001031019831 Operasional Puskessos Kelurahan		Rp600,000,000		Rp0		0.00%									
73	20192001031019854 Jumlah Puskesmas di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional	44	Kelurahan	0	Kelurahan	0.00%	1.00%								
<b>RATA-RATA</b>													<b>12.18%</b>	<b>3.78%</b>	
<b>PREDIKAT</b>													<b>SANGAT RENDAH</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum capaian indikator kinerja kunci pelaksana urusan wajib Bidang Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Sosial adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel ;**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci**  
**Pelaksana Urusan Wajib Bidang Sosial**  
**Tahun 2020**

No. IKK	IKK Output		Keterangan	IKK Outcome	Rumus	Nilai
1.f.1	1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	199	Jumlah Layanan Pengaduan: 198 Unit, terdiri dari : 1.SLRT: 1 Unit 2.Puskesmas Desa/ Kel Aktiv : 197 Unit dari 237 yang seharusnya aktif 3.Layanan Informasi Kebencanaan 1 Unit (Sumber informasi dari 22 Orang Tagana yang tersebar di Kecamatan)	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	26.721 ----- 26.721 x100% =100%
	2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		Jumlah Data DTKS katagori dimaksud :8348 Terdiri dari: 1. Anak Terlantar 758 Anak 2. Anak Balita Terlantar 107 Anak 3. Anak Dengan Kecacatan 226 Anak 4. Lanjut Usia Terlantar 4868 Orang 5. Penyandang Disabilitas Terlantar 2349 Orang			
	3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	SK Tim Reaksi Cepat Dinas Sosial Kabupaten Kukar tahun 2020			

	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	26721	<p>Penyandang Disabilitas yang Terlayani melalui program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PKH (Kementrian Sosial RI) (303)</li> <li>- Rehsos bagi PMKS ODGJ terlantar-Pemkab.(20).</li> <li>- Bantuan Sosial Terencana Prov. Kaltim (673).</li> <li>-Program ASPD Kemensos (125).</li> </ul> <p>Anak Terlantar yang Terlayani melalui Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-PKH (22.101).</li> <li>-Rehsos PMKS Kegiatan Pelayanan pada RPTC (37).</li> <li>- Panti Sosial Asuhan Anak Pemerintah (21).</li> <li>- Panti Asuhan Swasta (710) anak</li> <li>-Sakti Peksos (8).</li> </ul> <p>Lanjut Usia Terlantar yang Terlayani melalui program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PKH (Kementrian Sosial RI) (2684)</li> <li>-Rehabilitasi Sosial bagi PMKS -Pemkab.(3).</li> </ul> <p>Gelandangan dan Pengemis yang Terlayani melalui Program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rehabilitasi Sosial PMKS, kegiatan Day care service (10).</li> <li>-Rehabilitasi Sosial PMKS, kegiatan Pemulangan OT (26).</li> </ul>			
	5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	Kendaraan Khusus Layanan Kedaruratan bagi Pemerlu Layanan			
	6 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	801	<p>Anak Asuh dalam PSAA 21 Orang</p> <p>Anak Asuh Panti Swasta 710 Anak</p> <p>Anak Asuh SDLB 40 Anak</p> <p>Gepeng 10 Orang</p> <p>ODGJ Terlantar 20 Orang</p> <p>Lansia Terlantar 3 Orang</p>			
	7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	23	<p>Jumlah Shelter: terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.RPTC:1Unit</li> <li>2.LBK:1Unit</li> <li>3.PSAA:1Unit</li> <li>4.SLB:1Unit</li> <li>5. Panti Swasta : 19 Unit</li> </ol>			
	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	12	Penerima bantuan sandang pada Shelter-LBK			

	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	5	Penerima Alat Bantu berupa Kaki Palsu dan Kursi Roda			
	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	3	Kursiroda(1) Tongkat Piramid (2)			
	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	23	masing masing 1 paket di tiap shelter			
	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	49	Terlayani melalui Program - Rehabilitasi Sosial PMKS, kegiatan Day care service (23). - Rehabilitasi Sosial PMKS, kegiatan Pemulangan OT (26).			
	13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	3	Tenaga Kesehatan dari Puskesmas Rapak Mahang (Shelter LBK).			
	14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	138	Rata2 di setiap Shelter : petugas sosial 2 pengasuh 2 penjagalamam 1 Petugas Kebersihan 1			
	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	764	Gepeng 10 Orang ODGJ Terlantar 20 Orang Lansia Terlantar 3 Orang Anak Asuh PSAA 21 Anak Anak Asuh Panti Swasta 710 Anak			
	16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	43	Bimbingan terhadap 43 kasus Anak yang dilayani dinas sosial selama tahun 2020			
	17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	16	Pelayanan ODGJ Terlantar di LBK			

	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	22865	Anak Penerima PKH 22.101 Anak Anak Asuh dalam PSAA 21 Orang Anak Asuh dalam Panti Swasta 710 Anak Gepeng 10 Orang ODGJ Terlantar 20 Orang Lanjut Usia Terlantar 3 Orang			
	19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	21	Pelayanan OT Terlantar di LBK			
	20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	51	Pelayanan Pemulangan OT 26 orang Anak Terlantar 25 (ABH)			
	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	28	Pelayanan ODGJ Terlantar yang dirujuk ke RSJ (20 Orang) Penerima Kaki Palsu 3 Orang Lansia Terlantar yang dirujuk ke Panti Jompo 5 Orang			
	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	68977	Penerima Bantuan Permakanan Bencana terdiri dari: 1. Bencana Alam-Sosial: 911 kk/ 2339 Jiwa 2. Bencana Covid 19: 65.231 kk 3. Bantuan Sosial Masyarakat (BSM) Prov Kaltim 905 kk 4. Bantuan Sosial Tunai (BS) Kemensos 1930 KK	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	68977 ----- -- x100% =100% 68977
	2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	30	Penerima Family Kit		----- x 100 %	
	3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	24	Tempat Penampungan terdiri dari: 1. Tenda Keluarga - kayu : 3 Unit 2. Tenda Serbaguna : 1 Unit 3. Tenda Regu : 2 Unit 4. Tenda Pleton : 6 Unit 5. Tenda Keluarga : 10 Unit 6. Tenda Pengungsi : 2 Unit		Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan	
	4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	23	Penerima Kid ware			

	5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Tidak terjadi Bencana yang mengakibatkan adanya Pengungsian dalam jumlah besar yang memerlukan dukungan Psikososial selama tahun 2020.		setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	
	6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	826	Jumlah SDM bidang Sosial: 1.Pekerja Sosial (Sakti Peksos) 2 Orang 2.TKSK : 18 Orang 3.Penyuluh Sosial Masyarakat 26 Orang 4. Pengurus Forum PSM 22 Orang 5. Anggota PSM 182 Orang 6. Taruna Siaga Bencana (Tagana) 25 Orang 7. Puskesmas Desa/Kelurahan 197 Orang 8. SDM PKH 101 Orang 9. Pendamping KUBE 5 Orang 10. Kordinator Teknis BPNT 1 Orang 11. Pendamping Veteran 17 Orang 12. Karang Taruna Desa : 193 13. Forum Karang Taruna Kecamatan: 18 14. Forum Karang Taruna Kabupaten : 1 15. Pendamping Bantuan Sosial Pangan 18 Orang			

Berdasarkan Lampiran III.3 Format Indikator Kinerja Kunci Pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Sosial Kabupaten, terdapat 3 indikator kunci yang meliputi :

1. IKK Nomor 62 : Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).capaian Indikator Kinerja Kunci ini diukur melalui data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Penyandang Disabilitas yang Terlayani melalui program:
  - A. PKH (Kementrian Sosial RI) (303)
  - B. Rehsos bagi PMKS ODGJ terlantar-Pemkab.(20).
  - C. Bantuan Sosial Terencana Prov. Kaltim (673).
  - D. Program ASPD Kemensos (125).
  - E. Anak Terlantar yang Terlayani melalui ProgramPKH (22.101).
  - F. Rehsos PMKS Kegiatan Pelayanan pada RPTC (37).

G. Panti Sosial Asuhan Anak Pemerintah (21).

H. Panti Asuhan Swasta (710) anak

I. Sakti Peksos (8).

J. Lanjut Usia Terlantar yang Terlayani melalui program: PKH (Kementrian Sosial RI) (2684) Rehabilitasi Sosial bagi PMKS - Pemkab.(3).

K. Gelandangan dan Pengemis yang Terlayani melalui Program Rehabilitasi Sosial PMKS, kegiatan Day care service (10).

L. Rehabilitasi Sosial PMKS, kegiatan Pemulangan OT (26).

2. IKK Nomor 63 : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten. Tingkat capaian urusan ini diukur melalui Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, dimana Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dan BPBD memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana baik alam maupun sosial selama masa tanggap darurat.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial saat ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Sosial  
Kabupaten Kutai Kartanegara**

	IKK	Indikator Kinerja	Target Renstra_PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
	* Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	1 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	2 Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

### **1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD**

Kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya tergambar dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Urusan Wajib Sosial. Berdasarkan dokumen tersebut kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial tergambar dari ketersediaan sarana sosial, persentasi PMKS yang ditangani dan diberikan bantuan sosial.

Sarana sosial yang dimaksudkan dalam hal ini meliputi Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Jompo, Panti Rehabilitasi. Di Kabupaten Kutai Kartanegara ketersediaan sarana sosial mulai tahun 2017 terdapat 15 buah, yang terdiri dari panti asuhan dan panti rehabilitasi. Angka ini pada tahun 2020 bertambah menjadi sejumlah 19 buah, yang terdiri dari Panti Sosial Asuhan Anak yang dikelola oleh swasta sebanyak 17 buah dan 1 buah Panti Sosial Asuhan Anak yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial. Keberadaan sarana sosial ini mendukung pola penanganan masalah sosial yang dikonsentrasikan dalam sebuah lembaga pelayanan. Kemudian pada tahun 2016-2020 sarana sosial yang ada berjumlah 18 buah.

Sarana sosial ini memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada PMKS melalui pendekatan kelembagaan. Namun demikian pendekatan ini untuk masa mendatang tidak lagi menjadi titik berat pelayanan sehubungan dengan adanya kebijakan pelayanan yang berpusat pada komunitas (*community based services*).

Indikator persentasi penanganan PMKS di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2017. Angka ini dihitung dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ditangani, baik melalui pola bimbingan sosial dan pemberian bantuan sosial. Pada tahun 2017 sejumlah 40,92% PMKS menerima pelayanan, angka ini meningkat menjadi 41,16% pada tahun 2018. Data ini menunjukkan bahwa hampir setengah PMKS di Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil dilayani oleh Dinas Sosial. Namun demikian bila dibandingkan dengan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dimana

ditargetkan penanganan PMKS sebesar 80%, maka capaian kinerja tersebut masih belum tercapai.

## 2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tergambar dari pelaksanaan tugas setiap bidang. Untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilakukan melalui identifikasi permasalahan tabel sebagai berikut :

Tabel  
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Aspek Kajian	Permasalahan
Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum tersedia aturan hukum lokal yang mengatur kriteria kemiskinan yang berbasis pada kearifan local.</li> <li>b. Kurangnya tenaga terampil aparatur di Desa dan Kelurahan dalam proses pemutakhiran Data.</li> <li>c. Masih tingginya subyektifitas petugas pengolah data di kelurahan maupun desa dalam melakukan verifikasi dan validasi data.</li> <li>d. Tingkta akurasi data yang masih rendah.</li> <li>e. Akses internet yang belum tersedia baik dibeberapa wilayah.</li> </ul>
Bantuan stimulan bagi fakir miskin dan pendampingnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan prasarana bantuan stimulant dan pendampingnya bagi fakir miskin belum tersedia anggarnya.</li> <li>b. Belum tersedia tenaga fungsional pendamping sosial.</li> </ul>
Sarana dan prasarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana prasarana panti sosial kurang memadai</li> <li>b. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan standar pelayanan panti</li> <li>c. Belum tersedia panti rehabilitasi bagi ABH</li> <li>d. Belum tersedia pekerja sosial fungsional</li> </ul>

Pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana selama masa tanggap darurat	a. Kuantitas dan kualitas TAGANA masih kurang b. Kendaraan lapangan untuk penanganan bencana dalam kondisi rusak.
<b>Aspek Kajian</b>	<b>Permasalahan</b>
Pelayanan sosial anak terlantar diluar panti	a. Kurangnya tenaga pendamping sosial untuk pelayanan diluar panti b. Sarana prasarana penunjang pelayanan belum tersedia
Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat dan trauma	a. Kurangnya instruktur vokasional bagi penyandang cacat dan trauma b. belum adanya perda yang mengatur tentang pelayanan sosial bagi penyandang cacat c. sarana prasarana rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat masih terbatas
Pelayanan kesejahteraan sosial melalui UPT	a. Keterbatasan sarana prasarana sehingga daya tampung sangat terbatas b. Kurangnya petugas yang memiliki bekal ketrampilan teknis pelayanan kesejahteraan anak melalui panti c. Kurangnya pengetahuan petugas tentang standar pelayanan lembaga kesejahteraan sosial
PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	a. Jenis PSKS yang ada sangat terbatas b. Kurang intensifnya pembinaan terhadap TKSM

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diketahui adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dalam mewujudkan beberapa indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD. Beberapa permasalahan tersebut ada yang saling memiliki keterkaitan dan kesamaan. Pada dasarnya permasalahan yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Perlunya Updating data pemerlu pelayanan terutama Basis Data Terpadu yang saat ini dijadikan acuan mutlak dalam melaksanakan pelayanan.
2. kurangnya kualitas SDM aparatur pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial
3. kurang memadainya sarana prasarana penunjang pelayanan
4. kurang tersedianya regulasi daerah yang dapat menjadi pedoman secara teknis dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

### **3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih merupakan pedoman sekaligus sasaran yang ingin dituju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum program yang ditujukan untuk mencapai misi dilaksanakan, dilakukan analisa terhadap permasalahan dan factor-faktor yang mungkin dapat menghambat atau mendukung pelaksanaan program tersebut. Telaah terhadap kemungkinan adanya faktor penghambat ataupun pendukung pelaksanaan program ditampilkan dalam tabel berikut ini;

Tabel ;  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan  
 Wakil Kepala Daerah

<b>Visi: Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten			
	Program : Penanganan Fakir Miskin	Akurasi Basis Data Terpadu yang masih rendah Karen proses verivali sedang berjalan	Luas wilayah, banyaknya data yang harus diverivali,jaringan internet, SDM verivali data	Adanya dukungan program dari Kemensos dan dukungan KDH dalam proses verivali data.
	Program : Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Belum tersedianya panti panti rehabilitasi PMKS	Kuota Panti milik Provinsi terbatas	Upaya dilakukan melalui rehabilitasi berbasis masyarakat
	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial	Minimnya program komplementaritas bagi penerima manfaat Program Pusat	Transisi menuju bantuan non tunai sering terkendala system perbangkan	Pendampingan mulai intensif dilaksanakan dan sekaligus dalam rangka mensosialisasikan rencana pemenuhan program komplementaritas
	Program: Pemberdayaan Sosial	Belum optimalnya proses pemberdayaan PSKS	Kekosongan Pejabat pemangku	Adanya pendamping program yang diluncurkan kementerian Sosial RI
	Program: Pembinaan Panti Asuhan Anak / Panti Jompo	Perubahan SPM	Tanggung jawab pengelolaan panti ada pada pemerintah provinsi	Dalam masa transisi kabupaten masih diperkenankan melakukan pelayanan

Memperhatikan beberapa program yang disajikan untuk mencapai misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, perlu dilakukan

beberapa penajaman terhadap indikator kinerja (outcome) dan program yang disajikan.

Selain melakukan penajaman terhadap indikator kinerja dan mempertimbangkan ulang untuk menghapus nama beberapa program, dipandang perlu juga untuk Program Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Program Kementerian Sosial RI agar terjadi pula keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah. program baru didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang perubahan atas Permensos Nomor 27 tahun 2015 tentang Rencana strategis Kementerian Sosial tahun 2015-2019. Adapun program yang dipandang penting dalam upaya menyelaraskan dengan Rencana Kerja Daerah adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Mengacu pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditujukan bagi PMKS yang termasuk dalam katagori kelompok yang memerlukan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dengan pendekatan persuasive, motovatif, dan koersif baik melalui keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.

SPM mengatur kewajiban pemerintah daerah kabupaten/ kota melaksanakan penguatan kelembagaan, infrastruktur, SDM dan pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasarluar panti bagi anak terlantar, Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis terlantar.

2. Program Perlindungan dan jaminan sosial.

Program ini menitik beratkan sasaranya pada peningkatan kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui perlindungan sosial yang komprehensif, indikator sasaran program ini diantaranya adalah presentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandirianya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar dan presentase korban bencana dan kelompok rentan

3. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini penting untuk untuk dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam upaya penanggulangan Kemiskinan Di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini mencoba memaksimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan arah dan Kebijakan Kemntrian Sosial Republik Indonesia. Sasaran program ini adalah Lembaga Swadaya masyarakat yang bergerak dalam penanganan masalah sosial baik organisasi maupun perorangan.

#### 4. Program Penanganan fakir Miskin

Program ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan kelompok rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Indikator kinerja program yang menjadi sasaran adalah berkurangnya keluarga miskin dan kelompok rentan yang berkurang beban pengeluarannya melalui keuangan inklusi, keluarga miskin yang meningkat produktivitas sosial ekonominya, serta meningkatnya kualitas lingkungan rumah tinggalnya.

#### **4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD**

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan masalah sosial yang sifatnya sangat dinamis. Perkembangan masalah sosial terjadi seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat. Tantangan utama yang akan dialami oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengembangan pelayanan adalah kaderisasi sumberdaya manusia. Mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 akan banyak pegawai Dinas Sosial yang memasuki usia pensiun. Mereka terdiri dari pegawai yang berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dan pegawai yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial sejak awal bertugas sebagai pegawai.

Tantangan yang dihadapi ini disisi lain merupakan peluang bagi Dinas Sosial untuk mengembangkan pelayanan. Pensiunnya pegawai senior ini memberikan peluang bagi pegawai yang ada untuk mengembangkan diri melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional. Peluang lain yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan ini tentunya dilaksanakan melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan

kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut sebagian merupakan tugas fungsi Dinas Sosial.

Dengan demikian tentunya dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal pemenuhan anggaran dan fasilitas penunjang lainnya akan cenderung besar. Hal ini diperkuat dengan rasio rata-rata pertumbuhan serapan anggaran selama 5 tahun sebesar 35,27%, yang artinya realisasi serapan anggaran tiap tahun selalu meningkat.

## **5. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan cacatan yang strategis**

Memperhatikan beberapa permasalahan yang dialami Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok. Kelompok permasalahan ini merupakan masalah strategis yang merupakan isu strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beberapa isu strategis tersebut meliputi :

1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial
2. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan social
4. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Sosial, ditetapkan melalui serangkaian kebijakan dan program. Strategi ini sejalan dengan strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015, yang ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Gerbang Raja. Adapun kebijakan dan program tersebut sebagai berikut :

**1. Kebijakan** : Meningkatkan akses keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui program prioritas berikut ini :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Program ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki daya atau kemampuan sekecil apapun.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang mereka alami disebabkan oleh kurang optimalnya pemanfaatan daya atau kemampuan yang mereka miliki karena berbagai penyebab atau keterbatasan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pemberdayaan yang berarti memperkuat daya atau kapasitas yang mereka miliki, agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menolong mereka agar mampu menolong dirinya sendiri mengatasi permasalahan sosialnya.

b. Program Pembinaan Anak Terlantar

Anak adalah generasi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya permasalahan pada anak dapat berdampak pada masa depan anak yang juga masa depan bangsa. Pembinaan terhadap anak terlantar dilakukan agar anak dapat menjalankan tugas perkembangannya dengan baik, sehingga menjadi manusia dewasa yang sejahtera. Pembinaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak dan mempersiapkan anak memasuki masa dewasa.

c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

d. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)

**2. Kebijakan** : Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui program prioritas :

a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Didalam masyarakat sudah terdapat upaya-upaya yang melembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Upaya ini ada yang dilaksanakan dalam lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kualitas manajemen pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan

c. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial

d. Program Pelestarian Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkankan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2021 serta prospek tahun 2022 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022 di tetapkan sebagai berikut :

## Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022

### Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting				
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)					
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	6	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				23,220,520,794	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				23,220,520,794				
1	6	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				10,811,920,794	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				10,811,920,794			
1	6	1	2	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				100,000,000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				100,000,000		
1	6	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	3 Dokumen	60,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	2 Dokumen	60,000,000	
1	6	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	4 Dokumen	40,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	6 Dokumen	40,000,000	
1	6	1	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				9,542,748,000	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				9,542,748,000		
1	6	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	936 Orang Bulan	9,422.088,582	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	12 Bulan	9,422.088,582	
1	6	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	20 Dokumen	120,660,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	12 Bulan	120,660,000	

<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>52,800,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>52,800,000</b>	
1	6	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	52,800,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	52,800,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>0</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>0</b>	
1	6	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	200 Stel	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	200 Stel	0
1	6	1	2	3	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	15 Orang	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	50 Dokumen	0
1	6	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	0
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>202,248,800</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>202,248,800</b>	
1	6	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	50 Unit	5.110,200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	50 Unit	5.110,200
1	6	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	20 Unit	59.247,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	20 Unit	59.247,000

1	6	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Jenis	20,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Jenis	20,000,000
1	6	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	19,986,600	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	19,986,600
1	6	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1800 Exemplar	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1800 Exemplar	0
1	6	1	2	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	20 Jenis	29,998,000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	20 Jenis	29,998,000
1	6	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 OH	49,957,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 OH	49,957,000
1	6	1	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	12 Berkas	17,950,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	12 Bulan	17,950,000
1	6	1	2	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	4 Jenis	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	12 Bulan	0

<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>19,536,714</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>19,536,714</b>	
1	6	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1 Unit	0
1	6	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis	19,536,714	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis	19,536,714
1	6	1	2	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis	0
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>767,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>767,000,000</b>	
1	6	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	3 Jenis	2,299,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	3 Jenis	2,299,000
1	6	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	193,239,174	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	193,239,174
1	6	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	572,048,524	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	572,048,524
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>127,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>127,000,000</b>	

1	6	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	49 Unit	70,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	49 Unit	70,000,000
1	6	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	15 Unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	15 Unit	25,000,000
1	6	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	12 Unit	32,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	12 Unit	32,000,000
1	6	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	0
1	6	1	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	0
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				<b>725,000,000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				<b>1,025,000,000</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>				<b>75,000,000</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>				<b>75,000,000</b>
1	6	2	2	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kelekat	6 Komunitas	75,000,000	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kelekat	6 Komunitas	75,000,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>75,000,000</b>	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>125,000,000</b>

1	6	2	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Peserta	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	50 Orang	75,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Peserta	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	50 Orang	75,000,000	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>575,000,000</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>575,000,000</b>	
1	6	2	2	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	125,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	125,000,000	
1	6	2	2	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	200,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	200,000,000	
1	6	2	2	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Lembaga	200,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Lembaga	200,000,000	
1	6	2	2	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1 Lembaga	50,000,000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1 Lembaga	50,000,000	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>				<b>50,000,000</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>				<b>50,000,000</b>	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>				<b>50,000,000</b>	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>				<b>50,000,000</b>	

1	6	3	2	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	50,000,000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	50,000,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>1,765,000,000</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>1,765,000,000</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				<b>1,075,000,000</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				<b>1,765,000,000</b>
1	6	4	2	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	400,000,000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	400,000,000
1	6	4	2	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	200 Orang	150,000,000	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	200 Orang	150,000,000
1	6	4	2	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	200,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	200,000,000
1	6	4	2	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	125,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	125,000,000
1	6	4	2	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	100,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100,000,000

1	6	4	2	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	500 Orang	100,000,000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	500 Orang	100,000,000	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>				<b>690,000,000</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>				<b>690,000,000</b>	
1	6	4	2	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	75,000,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	75,000,000	
1	6	4	2	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	200,000,000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	200,000,000	
1	6	4	2	4	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	80,000,000	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	80,000,000	
1	6	4	2	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	60,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	60,000,000	
1	6	4	2	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	100,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	100,000,000	

1	6	4	2	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	100,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	100,000,000
1	6	4	2	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	750,000,000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	750,000,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				<b>9.043,600,000</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				<b>9.043,600,000</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>				<b>300,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>				<b>300,000,000</b>
1	6	5	2	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	300,000,000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	300,000,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>8,743,600,000</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>8,743,600,000</b>
1	6	5	2	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	250,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	250,000,000
1	6	5	2	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474 Orang	420,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474 Orang	420,000,000
1	6	5	2	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2639 Orang	7.943,600,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2639 Orang	7.943,600,000

1	6	5	2	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	130,000,000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	130,000,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				<b>625,000,000</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				<b>1,050,000,000</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>425,000,000</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>750,000,000</b>
1	6	6	2	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Keluarga	300,000,000	Penyediaan Makanan	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Keluarga	300,000,000
1	6	6	2	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Keluarga	125,000,000	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Keluarga	125,000,000
1	6	6	2	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Keluarga	0	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Keluarga	0
1	6	6	2	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Keluarga	0	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Keluarga	0
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				<b>200,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				<b>200,000,000</b>
1	6	6	2	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Desa/ Kelurahan	100,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Desa/ Kelurahan	100,000,000

1	6	6	2	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	100,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	100,000,000	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				<b>200,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				<b>200,000,000</b>	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				<b>200,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				<b>200,000,000</b>	
1	6	7	2	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Lokasi	100,000,000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Lokasi	100,000,000	
1	6	7	2	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Lokasi	100,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Lokasi	100,000,000	
<b>TOTAL</b>								<b>23,220,520,794</b>						<b>23,220,520,794</b>	

### 3.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian pengumpulan informasi dilapangan dan pengamatan maka disusun dan diusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 meliputi 5 (lima) program generik yang dilaksanakan dalam 32 (tiga puluh dua) kegiatan, dan 5 (lima) program non generik yang dilaksanakan dalam 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan. Adapun target sasaran dan target output yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	2 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	6 Dokumen	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	12 Bulan	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	12 Bulan	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	200 Stel	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	50 Dokumen	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	50 Unit	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	20 Unit	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Jenis	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1800 Exemplar	
6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	20 Jenis	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	10 Jenis	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 OH	
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	12 Bulan	
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	12 Bulan	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1 Unit	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	3 Jenis	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	12 Bulan	

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	12 Bulan	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	12 Bulan	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>					
<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>					
1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kelekat		
<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Peserta	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	100 Orang	
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Lembaga	
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1 Lembaga	
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>					
<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>					
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>					
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>					
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	

2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	200 Orang	
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Klien Yang difasilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	
7	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1000 Orang	
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>					
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	
2	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	
3	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	
4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>					
<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>					
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Orang	

<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Keluarga
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Keluarga
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Keluarga
4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Keluarga
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Desa/ Kelurahan
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Desa/ Kelurahan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Lokasi
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Lokasi

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal. Salah satu lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan adalah sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 diperoleh informasi tabel sebagai berikut :

Tabel ;

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

<b>No</b>	<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos</b>	<b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
1	Menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen dari target nasional pada tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Sumber data yang akan dijadikan basis data belum tersedia dengan mudah dan cepat</li> <li>2.Koordinasi dengan instansi penyedia data belum berjalan dengan baik, karena adanya pembatasan kewenangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terintegrasinya aplikasi pengolah dan penyedia data PMKS dengan basis data kemiskinan</li> <li>2. Kurangnya kapasitas SDM dalam pengelolaan basis data kemiskinan dan PMKS</li> </ol>	Memberikan peluang kerjasama dengan instansi penyedia data untuk meningkatkan kualitas basis data dalam mendukung pencapaian sasaran
2	Pengembangan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan kesejahteraan sosial (LKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pendamping dan pembimbing LKS</li> <li>2.Kerjasama dengan BBPPKS dalam pengembangan kapasitas SDM belum berjalan dengan baik</li> </ol>		Menjadi faktor pemicu dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur diperoleh informasi tabel sebagai berikut :

Tabel ;  
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara  
berdasarkan Sasaran Renstra Dinsos Prov Kalimantan Timur  
Tahun 2019-2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov Kaltim	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dimensi kualitas hidup yang sangat luas sehingga perlu diturunkan secara lebih khusus untuk memudahkan penanganan	Tidak adanya informasi yang tegas tentang berapa kontribusi yang diharapkan dari Kabupaten/Kota untuk mencapai target sasaran tersebut	
2	Meningkatkan potensi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Upaya peningkatan potensi sosial PMKS masih dipahami dengan sangat sederhana dan terbatas	PMKS sangat mengharapkan upaya pemberdayaan yang bersifat instan, bukan pemberdayaan yang sebenarnya merupakan proses yang cenderung Panjang	Kebijakan Kepala Daerah untuk pemberdayaan masyarakat sangat tinggi
3	Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1.PSKS terutama TKSM yang jumlahnya paling banyak, kondisinya banyak yang sdh tidak aktif lagi 2.TKSM yang ada sudah banyak yang memasuki usia lanjut 3.PSKS yang masih potensial jumlahnya sangat terbatas dan sebarannya cukup jauh	Pola pembinaan dan pemberian wewenang yang kurang jelas terutama bagi TKSM	Adanya kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, memerlukan partisipasi aktif dari PSKS
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	1.Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur	1. Penempatan SDM Aparatur yang tidak sesuai dengan disiplin	Kebijakan Kepala Daerah untuk meningkatkan

		2. Banyaknya aturan penyelenggaraan pemerintahan yang seringkali membingungkan dalam pelaksanaannya 3. Terbatasnya sarana prasarana penunjang kinerja SKPD	ilmu yang dikuasainya 2. Tidak tersedianya petunjuk teknis operasional yang jelas dan mudah dioperasikan	kualitas akuntabilitas kinerja dengan memberikan <i>reward and punishment</i> yang jelas
--	--	---	---	--

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja\_PD

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan mendasari penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai oleh SKPD. Pernyataan tujuan ini selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan SKPD;
2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis SKPD yang sesuai dengan bidang layanan SKPD;
6. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
7. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
8. Kriteria SMART-C yaitu:

- a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e) *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f) *continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dirumuskan dalam tabel berikut ini :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara  
Tahun 2021 – 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar		Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	93%	94%	94%	96%	97%	98%	99%	99%
		Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	93%	94%	94%	96%	97%	98%	99%	99%
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Predikat akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai	74.76	76	78	79	81	82	84	84

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, Misi Kepala Daerah yang dibebankan Kepada Dinas Sosial diantaranya :

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
- b) Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan.

2. Pencapaian SDGs

Dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan Dinas Sosial memberikan kontribusi dalam penanganan dan upaya pengentasan kemiskinan. Terlihat dari beberapa program dan kegiatan yang disasarkan kepada kelompok marginal. Dalam hal penanganan kemiskinan, masyarakat Kutai Kartanegara yang masuk didalam Basis Data Terpadu Kemiskinan memperoleh bantuan Sosial juga dari Kementrian Sosial RI melalui Program PKH dan BPNT dimana Kabupaten memiliki kewajiban mendukung kegiatan pendampingan terhadap pelaksanaan program tersebut.

3. Pengentasan Kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya tidak mungkin dibebankan kepada Dinas Sosial saja Karena dari sisi kriteria kemiskinan sendiri terdapat beberapa bagian merupakan tanggung jawab instansi terkait lainnya. Dinas Sosial berfungsi lebih kepada upaya pemenuhan Jaminan Hidup dan fasilitasi terhadap aksesibilitas warga miskin dalam memperoleh pelayanan yang layak. Oleh karena itu kolaborasi antar seluruh stake holder terkait

sangat diperlukan dalam memecahkan masalah pengentasan kemiskinan. Dan harapannya Dinas Sosial ada digarda terdepan dalam upaya upaya tersebut, bukan berate sebagai penanggungjawab utama tetapi lebih kepada perumusan strategi penanganan kemiskinan yang tepat dan sesuai dengan karakter kemiskinan wilayah.

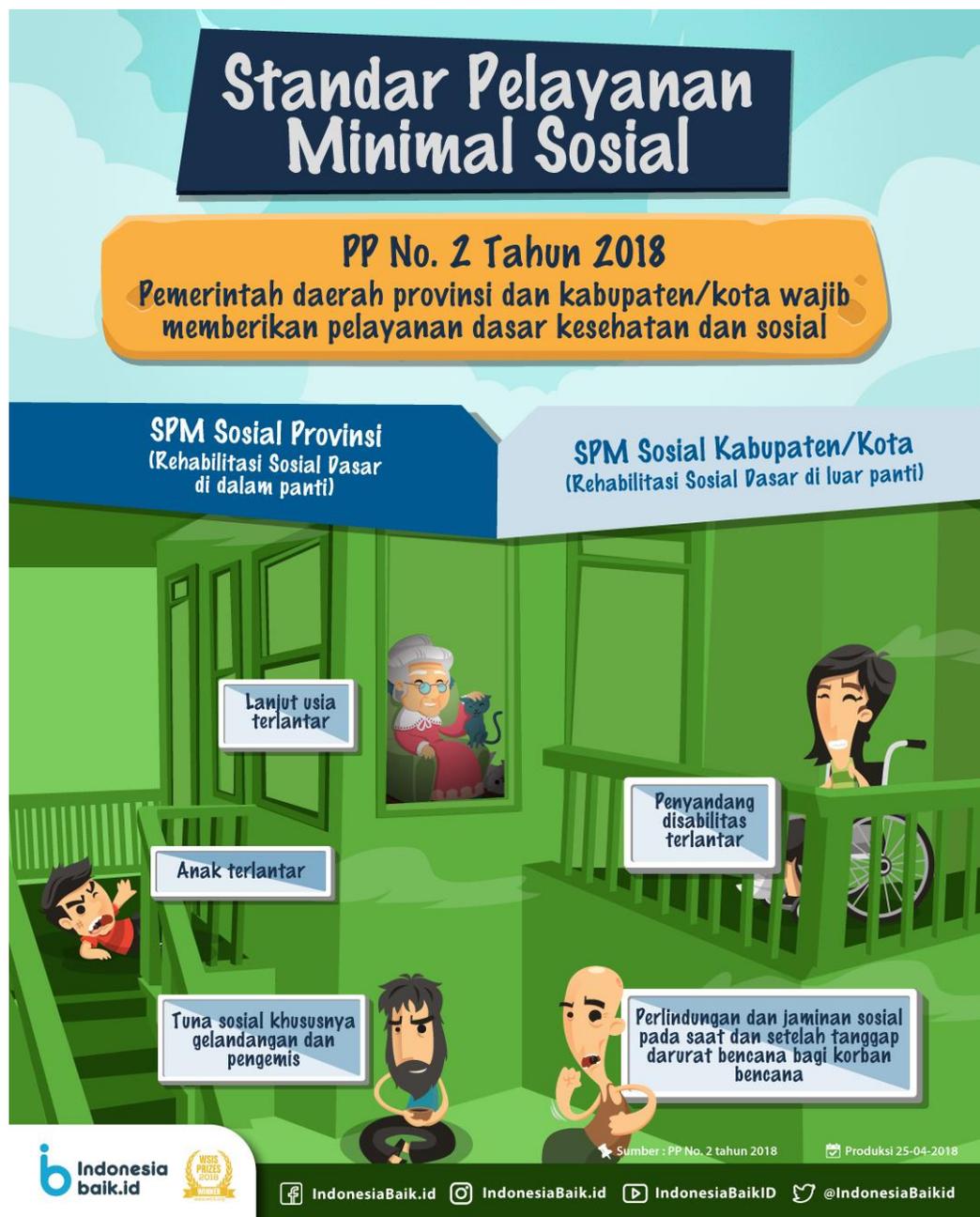
4. Pemutakhiran Basis Data Terpadu atau DTK

5. Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang menjadai tanggung jawab instansi Sosial di daerah menurut Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang SPM bidang Sosial Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota diantaranya :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial.
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Dalam hal ketersediaan anggaran Perangkat daerah telah berupaya melakukan pemenuhan terhadap SPM tersebut.



- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
1. Pada tahun anggaran 2022 Jumlah Program yang dilaksanakan Dinas Sosial sebanyak 7 Program dengan 19 kegiatan.
  2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegra untuk Kegiatan yang bersifat pendampingan dan juga yang terfokus ke satu Kecamatan atau Desa jika jenis kegiatannya bersifat Pelatihan Keterampilan.

3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2022 adalah sebesar Rp. 22,421,739,660, -
- c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial tahun 2022 dan Perkiraan maju Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial tahun 2022 dan  
Perkiraan maju Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
				Prog	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
<b>1 6</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>						<b>23,220,520,794</b>					<b>23,220,520,794</b>
<b>1 6 1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>10,811,920,794</b>					<b>10,811,920,794</b>
<b>1 6 1 2</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>100,000,000</b>					<b>100,000,000</b>
1 6 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan		3 Dokumen		60,000,000		Jumlah Dokumen	3 Dokumen		60,000,000
1 6 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu		4 Dokumen		40,000,000		Jumlah Dokumen	4 Dokumen		40,000,000
<b>1 6 1 2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>9,542,748,000</b>					<b>9,542,748,000</b>
1 6 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan		936 Orang Bulan		9,422.088,582			936 Orang Bulan		9,422.088,582

1	6	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	20 Dokumen	120,660,000				120,660,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>52,800,000</b>				<b>52,800,000</b>
1	6	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	52,800,000				52,800,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>0</b>				<b>40,000,000</b>
1	6	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	200 Stel	0				0
1	6	1	2	3	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	15 Orang	0				40,000,000
1	6	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Orang	0				0
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>202,248,800</b>				<b>202,248,800</b>
1	6	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	50 Jenis	5.110,200				5.110,200
1	6	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	20 Jenis	59.247,000				59.247,000

1	6	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Jenis	20,000,000					20,000,000
1	6	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	19,986,600					19,986,600
1	6	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1800 Exemplar	0					0
1	6	1	2	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	20 Jenis	29,998,000					29,998,000
1	6	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 OH	49,957,000					49,957,000
1	6	1	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	12 Berkas	17,950,000					17,950,000
1	6	1	2	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	4 Jenis	0					20,000,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>19,536,714</b>					<b>19,536,714</b>

1	6	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan		1 Unit		0				0
1	6	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Jenis		19,536,714				19,536,714
1	6	1	2	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Jenis		0				0
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>767,586,698</b>				<b>767,586,698</b>
1	6	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,299,000				2,299,000
1	6	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		193,239,174				193,239,174
1	6	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		572,048,524				572,048,524
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>127,000,000</b>				<b>127,000,000</b>

1	6	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan		49 Unit		70,000,000				70,000,000	
1	6	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan		15 Unit		25,000,000				25,000,000	
1	6	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan		12 Unit		32,000,000				32,000,000	
1	6	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit		0				0	
1	6	1	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit		0				0	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>							<b>725,000,000</b>				<b>725,000,000</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>							<b>75,000,000</b>				<b>75,000,000</b>
1	6	2	2	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kelekat		6 Komunitas		75,000,000				75,000,000	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>75,000,000</b>				<b>75,000,000</b>

1	6	2	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Peserta	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	50 Orang	75,000,000				75,000,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>575,000,000</b>				<b>575,000,000</b>
1	6	2	2	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	125,000,000				125,000,000
1	6	2	2	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	200,000,000				200,000,000
1	6	2	2	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Lembaga	200,000,000				200,000,000
1	6	2	2	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1 Lembaga	50,000,000				50,000,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>				<b>50,000,000</b>				<b>50,000,000</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>				<b>50,000,000</b>				<b>50,000,000</b>

1	6	3	2	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Orang		50,000,000				50,000,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>						<b>1,765,000,000</b>			<b>1,765,000,000</b>	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>						<b>1,075,000,000</b>			<b>1,075,000,000</b>	
1	6	4	2	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 Orang		400,000,000				400,000,000
1	6	4	2	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan		200 Orang		150,000,000				150,000,000
1	6	4	2	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Orang		200,000,000				200,000,000
1	6	4	2	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Orang		125,000,000				125,000,000
1	6	4	2	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		50 Orang		100,000,000				100,000,000





1	6	5	2	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2639 Orang			7.943,600,000					7.943,600,000
1	6	5	2	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang			130,000,000					130,000,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>						<b>625,000,000</b>					<b>625,000,000</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>						<b>425,000,000</b>					<b>425,000,000</b>
1	6	6	2	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Keluarga			300,000,000					300,000,000
1	6	6	2	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Keluarga			125,000,000					125,000,000
1	6	6	2	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Keluarga			0					0
1	6	6	2	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penerima Bantuan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Keluarga			0					0

1	6	6	2	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>					<b>200,000,000</b>				<b>200,000,000</b>
1	6	6	2	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Desa/ Kelurahan				100,000,000
1	6	6	2	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Orang				100,000,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>					<b>200,000,000</b>			<b>200,000,000</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>					<b>200,000,000</b>			<b>200,000,000</b>
1	6	7	2	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Lokasi				100,000,000
1	6	7	2	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Lokasi				100,000,000
<b>TOTAL</b>								<b>23,220,520,794</b>				<b>23,280,520,794</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, proses penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;
  1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial
  2. Optimalisasi Kegiatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
  3. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kebutuhan saat ini adalah perlunya tersedia kendaraan khusus angkutan PMKS sebagai bentuk pemenuhan SPM bidang Sosial.
  4. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  5. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan ;

Berdasarkan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu satu tahun. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja PD Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara kurun waktu 2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra perlu dievaluasi berkala untuk menjamin bahwa target kinerja yang telah disusun masih relevan dengan kebutuhan perkembangan permasalahan sosial.

- c. Rencana tindak lanjut ;
1. Peningkatan Kualitas Sumber daya aparatur penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
  2. Optimalisasi Pemutakhiran DTKS.
  3. Penyediaan Kendaraan Khusus PMKS.
  4. Sinergitas antar stakeholders.

Rencana Kerja (RENJA) PD berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Kerja (RENJA) PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Akhirnya semoga Dokumen Rencana Kerja (Renja) PD ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Akhirnya semoga Dokumen Renja PD tahun 2022 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

Tenggarong, 19 Juli 2021

Kepala Dinas Sosial



Ir. Didi Ramyadi, MM  
NIP. 19640710 199301 1 001